



FILSAFAT ILMU ADMINISTRASI SEBAGAI HAKIKAT DAN MAKNA DALAM KEILMUAN ADMINISTRASI PUBLIK

Hasbi Shiddiq Fauzan

Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut.

hasbishiddiqfauzan@fisip.uniga.ac.id.

Abstrak

Filsafat adalah metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan ilmu. Dalam filsafat ilmu, administrasi dikenal sebagai *artistic sciences* karena aplikasinya, seni masih memegang peran yang menentukan. Sebaliknya, seni administrasi dikenal sebagai *scientific art* karena didasarkan pada sekelompok prinsip yang telah teruji "kebenarannya". Melalui administrasi, administrasi publik dalam konteks filsafat ilmu, adalah sifat apa yang diteliti dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola dengan baik untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan umum. Dan bagaimana hal itu mempengaruhi jalannya administrasi publik dalam mengembangkan ilmunya. Lalu bagaimana cara membuat birokrat yang bertanggung jawab atas masalah yang ada di masyarakat, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap realitas yang ada di masyarakat. Disini administrasi publik berperan antara hubungan dengan masyarakat. Kemudian administrasi harus mampu membangun sumber daya manusia yang mampu menjalankan peran administrasi publik dalam proses penyelenggaraannya. Administrasi publik sebagai pelaksana strategi yang merumuskan proses penyelenggaraan melalui sumber daya administrasi secara sistematis dan sistemik.

Kata kunci: Filsafat Ilmu; Administrasi; Administrasi Publik.

1 Pendahuluan

Pada era ini, manusia memiliki kecamuk pikirannya masing-masing yang berdampak pada kisah kebatinan dalam hidup, yang semua akan menjadi ilmu. Penghidupan di dunia dan kemajuan dunia dapat diumpamakan sebagai air mengalir. Tidak pernah kita turun mandi dua kali ke dalam air yang itu juga. Air yang kita masuki kedua kalinya sudah lain dari pada air yang pertama kali. Rupanya saja air itu air tadi, tetapi sebenarnya sudah berganti. Air yang lain sekarang meliputi tepi sungai itu. Demikian juga tak ada barang yang tetap seperti keadaannya bermula. Tiap-tiap barang tersedia akan berubah jadi keadaan sebaliknya.

Filsafat adalah metode yang mengatur bagaimana kita bijak dalam menggunakan sebuah ilmu. Menurut Henderson dalam Sadulloh, filsafat diartikan sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya mengenai segala sesuatu yang ada.¹ Maka filsafat mengajarkan dan memberikan pengertian bahwa dalam penggunaan sebuah ilmu haruslah diiringi dengan kebijaksanaan. Menurut Sardar ilmu atau sains adalah cara mempelajari alam secara obyektif dan sistematis serta ilmu merupakan suatu aktifitas manusia.² Ilmu merupakan akumulasi dari pengetahuan yang dibalut dengan sedemikian rupa sampai terbentuknya menjadi ilmu. Maka bisa dikatakan bahwa pengetahuan bukan berarti ilmu, tapi ilmu merupakan sebuah pengetahuan.

Garapan dalam kefilosofan keilmuan, dibagi ke dalam beberapa komponen bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. (1) Ontologi diartikan tentang bagaimana mencari hakikat kebenaran dan kenyataan dalam keilmuan mengenai apa dan bagaimana (yang) ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Hakim dan Saebani menyebutkan bahwa ontologi adalah teori hakikat yang mempertanyakan setiap eksistensi,³ yang dimana berperan sebagai basis pondasi bangunan dasar bagi keilmuan. (2) Epistemologi berfungsi bagaimana kebenaran itu diartikan dalam mencapai pengetahuan (ilmiah). Maka epistemologi berfungsi mengatur perbedaan pengartikulasian keilmuan ke dalam ruang-ruang keilmuan normatif. Normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur, dan dalam hal ini tolak ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan,⁴ yang nantinya akan dijadikan landasan berfikir. Sehingga penentuan ruang yang kita pilih akan menjadi akal, akal budi, pengalaman, atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi. (3) Aksiologi berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk nilai-nilai (*values*) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan kehidupan pencarian keilmuan. Lebih dari itu nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu yang wajib dipatuhi, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu.

Alur hidup dalam pencarian keilmuan memang susah ditebak. Tapi, di dalam hidup, mukjizat terbesar yang bisa dirasakan manusia adalah kemungkinan-kemungkinan, terutama ketika salah satunya menjelma menjadi kebenaran dan kenyataan. Perkembangannya filsafat ilmu mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu. Fungsi dan manfaat yang diperoleh dari ilmu pengetahuan merupakan tujuan akhir dari semua pengetahuan,⁵ kemudian menyangkut etik, etika dan estetika, bahkan sampai pada dimensi kebudayaan. Untuk menangkap tidak saja kegunaan atau kemanfaatan ilmu,

¹ Uyoh Sadulloh. (2012). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, hlm. 16.

² Ziauddin Sardar. (2000). *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 22.

³ Dengan demikian, sumber yang ditemukan dan ketika berbicara tentang sumber setiap pengetahuan, dalam filsafat lahir pendekatan kedua, yaitu epistemologi yang berasal dari bahasa latin "*episteme*" yang berarti *knowledge*, yaitu pengetahuan "*logos*" berarti *theory*. Jadi, epistemologi berarti teori tentang pengetahuan atau teori tentang metode, cara dan dasar dari ilmu pengetahuan, atau studi tentang hakikat tertinggi, kebenaran, dan batasan ilmu manusia. Lihat Atong Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani. (2008). *Filsafat Umum Dari Metodologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 22.

⁴ Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat tidak cukup hanya member deskripsi atau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui itu terjadi (seperti dibuat oleh psikologi kognitif), tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistimik. Lihat J. Sudarminta. (2002). *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kansius, hlm. 19.

⁵ Kinerja pengetahuan yang "tidak luput" dari nilai. Diacuhkannya netralitas etik dalam memadukan akal dengan pengalaman indra, kemudian melekat aspek etika, estetika, dan instrumentalialia yang memuliakan hidup manusia. Sejak manusia membutuhkan ilmu pengetahuan, sejak itu pula ada nilai-nilai yang ditargetkan. Lihat Beni Ahmad Saebani. (2009). *Filsafat Ilmu, Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk-Beluk Sumber dan Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 190.

tetapi juga arti maknanya bagi kehidupan. Saat ini manusia selalu berfikir instan dan hanya mau melihat hasil tanpa mau melihat bagaimana sebuah proses terjadi. Sehingga benturan pertama bagi sebuah paradigma untuk berjalan adalah dampak jangka-pendeknya. Atau dengan kata lain, *problem survival* yang akhirnya menuntut untuk meninggalkan pikiran-pikiran panjang. Paradigma pemikiran tentang pencarian keilmuan harus mampu berkayuh di antara gelombang panjang dan gelombang pendek, agar gelombang panjang yang akan kita lalui tetap terkejar dan gelombang pendek yang kita tempuh tidak cukup kuat untuk menghancurkan biduk kita yang rapuh.

Keilmuan mempelajari ilmu administrasi dalam penerapannya dilakukan dengan pendekatan yang harus diutamakan. Menurut Achmad ada dua pendekatan utama yakni pendekatan ilmu (*scientific approach*) dan pendekatan manusiawi (*human approach*). Untuk mencapai kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan modern harus mengutamakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam administrasi perlu pembinaan dan pengembangan, antara lain dengan menerapkan filsafat administrasi yang sesuai dengan faktor-faktor lingkungan, bangsa dan Negara.⁶ Maka sudah seharusnya paradigma keilmuan yang dibentuk harus menempati posisi yang sangat penting dalam pemandu-gerak keilmuan administrasi. Meskipun selalu diawali dengan pembacaan realitas masalah yang demikian kompleks. Maka pembacaan realitas masalah dengan paradigma keilmuan administrasi harus mampu mencerminkan masalah sebenarnya yang tengah dihadapi. Tanpa diawali dengan pembacaan semacam ini, perdebatan paradigma pasti akan terjebak ke dalam impian dan nostalgia akan kebenaran yang sia-sia. Menurut Siagian, ilmu administrasi tergolong ke dalam ilmu-ilmu sosial dan malahan dapat dikatakan merupakan salah satu cabang terbaru dari ilmu-ilmu sosial.⁷ Ilmu-ilmu sosial mempunyai prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang bersifat universal. Akan tetapi, di dalam penerapannya berlaku hukum adaptasi sebagai penerapan prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat, waktu, dan manusia itu sendiri agar mampu memberikan hasil yang diharapkan. Dalam ilmu-ilmu sosial satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian. Memperhitungkan situasi, kondisi, tempat, waktu, dan manusia dalam ilmu administrasi disebut memperhitungkan faktor ekologis (lingkungan) yang akan disoroti.

Menurut Thoha, administrasi publik sangat perhatian terhadap terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan amanah. Tata pemerintahan yang baik (*Good Government*) itu diwujudkan dengan lahirnya tatanan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan dan berwibawa. Tata pemerintahan yang demokratis menekankan bahwa lokus dan fokus kekuasaan itu tidak hanya berada di pemerintahan saja, melainkan beralih terpusat pada tangan rakyat. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik terletak seberapa jauh konstelasi antara tiga komponen rakyat, pemerintah dan pengusaha berjalan secara kohesif, selaras, kongruen dan sebanding. Berubahnya sistem kesinambungan antara tiga komponen tersebut melahirkan segala macam penyimpangan termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme berikut tidak

⁶ Tjetjep Achmad. (1989). *Filsafat Administasi dan Manajemen*. Bandung: YBA-IKLUM STIA-LAN RI Jawa Barat, hlm. 15.

⁷ Secara khusus dapat pula dikatakan bahwa ilmu administrasi itu termasuk kelompok *applied sciences* dalam ilmu-ilmu sosial karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia. Lihat Sondang P. Siagian. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 17.

ditegakannya hukum secara konsekuen.⁸ Administrasi publik juga dapat dilihat sebagai suatu okupasi, yakni pekerjaan apapun yang dilakukan birokrat; sebagai fisikawan, arsitek, dokter dan sebagainya. Mereka seringkali melihat diri mereka berdasarkan profesi tertentu. Meskipun mereka tidak melihat dirinya sebagai administrator dalam pandangan menjadi seorang manajer, akan tetapi mereka tetap memberikan pelayanan kepada publik.

2 Hakikat Yang Terkandung Dalam Administrasi Publik

Secara basis ontologi bahwa pengembangan keilmuan administrasi publik dalam konteks filsafat ilmu administrasi, adalah hakikat apa yang dikaji dari aspek bagaimana proses administrasi publik dikelola secara baik untuk mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Maka disini birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang berperan terlibat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain secara kolektif. Menurut Suryadi, secara substansial wilayah kajian pekerjaan manajer memiliki variasi kepentingan dari pemerintahan dan masalah-masalah publik, mulai dari pertahanan dan keamanan sampai pada kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan, dari desain dan konstruksi jalan dan jembatan sampai eksplorasi ruang angkasa dan dari masalah pajak dan administrasi keuangan sampai manajemen sumber daya manusia.⁹ Administrasi publik menginginkan bagaimana memfokuskan pelayanan yang lebih baik kepada semua manusia warga Negara dengan kreativitas barunya. Kita harus memikirkan jalan terbaik untuk bekerja disemua tingkatan pemerintahan. Kita menghendaki dan mengembangkan kemitraan dengan institusi yang nirlaba dan organisasi-organisasi non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat). Kita harus mulai dengan pola pendekatan Millennium memiliki tingkat kehirauan dari sejumlah pertanggungjawaban dan yang diminta ditunjukkan kepada kita sebagai petugas administrasi publik.

Pola pikir manusia seharusnya dibentuk dalam dua pola pikir. *Pertama*, bagaimana manusia masuk dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, membantu membangun proses tersebut secara sistemik sampai kepada hasil yang maksimal. *Kedua*, manusia masuk ke dalam masyarakat, membantu menyadarkan terkait bagaimana pelayanan publik sebetulnya sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga tidak ada lagi saling benturan antara pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik dengan penerima dari penyelenggaraan tersebut. Ibrahim mengungkapkan, nampaknya perkembangan ilmu administrasi publik bertumpu pada kajian-kajian yang bersifat interdisipliner, yang lebih bermuara kepada studi-studi kasus dalam pencarian kebenaran yang didasarkan pada pengalaman atau upaya penerapannya, sesuai kondisi suatu Negara, bahkan Wilayah, akibat perkembangan prinsip Otonomi/Desentralisasi yang melanda seluruh bagian Dunia baik Negara-Negara maju maupun berkembang.¹⁰ Dalam masa transisi (seperti Indonesia) sebaiknya administrasi publik diawali dengan prosedur dalam memperbaiki sistem (perumusan visi misi, strategi kebijakan pembangunan secara komprehensif integral, baru

⁸ Miftah Thoha. (2011). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 91.

⁹ *Public administration* memiliki variasi manfaat serta kepentingan pada skope dan subatansi, orang yang bekerja pada sektor organisasi publik harus memiliki komitmen. Dari semua itu yang lebih penting adalah memiliki komitmen pada pelayanan publik. Lihat Soleh Suryadi. (2012). *Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*. Bandung: Prisma Press, hlm. 6.

¹⁰ Amin Ibrahim. (2008). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama, hlm, 12.

diikuti pelenturan struktur organisasi, teknik, dan metode-metode serta modifikasi-modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan.

Adminitrasi publik mengupayakan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat kolektif menjadi kegiatan pemerintahan yang bersifat manajemen (perencanaan, pengorganiasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan) dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksananya. Dalam mekanisme kerjanya diperlukan partisipasi *stake holders* pembangunan, seumber daya manusia sebagai penyelenggara di sokong oleh *stake holders* yang berkualitas. Maka secara garis dan basis ontologi penguatan itu akan terjadi sebagaimana mestinya, dengan bagunan yang kokoh akan menjadi suatu kesatuan dalam pengembangan keilmuan administrasi publik.

Secara basis epistimologi berpengaruh terhadap cara bagaimana ilmuwan administrasi publik ke depan mengembangkan ilmu ini. Jika selama ini ilmuwan administrasi publik lebih berkuat pada diskusi yang bersifat filosofis tentang administrasi, standar etika dan norma bagi manajer publik dalam menjalankan tugasnya, maka ke depan jika administrasi publik berubah menjadi manajemen publik, orientasi keilmuan dari disiplin ini juga akan bergeser pada hal-hal yang lebih empirikal tentang bagaimana mengembangkan keilmuan untuk membantu manajer publik mencapai tujuan organisasi, bagaimana meningkatkan kemampuan manajerial mereka dan bagaimana meningkatkan akuntabilitas para manajer publik tersebut di depan masyarakat.

Filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya, dari sudut intinya yang mutlak, terdalam tetapi tidak berubah (*Notonegoro*), atau perenungan yang sedalam-dalamnya tentang sebab “ada” dan “perbuat”. Kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai kepada “mengapa” yang penghabisan (*Drijarkara*). Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kecauan pengertian sehari-hari. Selanjutnya bila kita berbicara tentang administrasi publik secara filsafati maka para administrator publik yang menjalankan roda administrasi publik harus selalu bijaksana sehingga kebijakan yang diambil dalam pengambilan keputusan administrasi, skala prioritas, dan alternatif pilihan berangkat dari pengkajian kebenaran itu sendiri dengan dasar kebijaksanaan.

Bila dalam filsafat dikaji melalui kebenaran, termasuk kebenaran yang hakiki maka mutlak Allah sebagai penentunya, kendatipun agama membahas hal-hal yang gaib, namun pembahasan administrasi publik dihubungkan dengan hal ikhwal kegaiban. Sehingga sekularisme ditolak. Dengan begitu etika administrasi publik sebagai cabang ilmu filsafat hanya mengacu kepada norma saja, tetapi jika kepada nilai-nilai luhur agama apalagi kita sadari bahwa norma berbeda pada berbagai ruang dan waktu. Sedang agama cenderung relatif lebih universal. Etika, termasuk etika birokrasi mempunyai dua fungsi. *Pertama*, sebagai pedoman, acuan, refrensi bagi administrasi Negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji, dan tidak tercela. *Kedua*, etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji. Etika pelayanan publik dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik. Agus, dkk menyebutkan, etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar

mengutamakan kepentingan masyarakat luas.¹¹ Etika birokrasi (administrasi publik) adalah sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam organisasi.

Secara basis aksiologi menjelaskan bahwa untuk menciptakan para birokrat-birokrat yang mana mereka bertanggung jawab, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap realita-realita yang ada di dalam masyarakat. Setelah mengamati realita-realita yang ada di dalam masyarakat tersebut maka harus dikaitkannya dengan konsep-konsep teori yang ditawarkan lalu membuat kebijakan atas realita yang terjadi di masyarakat tersebut. Sehingga disini, tidak hanya sekedar eksistensi atau popularitas saja yang ditonjolkan oleh para birokrat-birokrat. Tetapi mereka harus memahami bagaimana masyarakat membutuhkan pelayanan yang terbaik, minimalnya para birokrat memaksimalkan kinerjanya untuk kepentingan bersama.

Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhannya pun semakin bertambah. Kebutuhan yang bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhannya, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut kadang kala etika yang akhirnya akan membawa dampak pada hubungan antara penempatan persoalan kebenaran dan kenyataan yang dialami. Persoalannya etika akan menjadi dasar manusia dalam bertindak. Syafiiie menyebutkan bahwa, pada kajian etika kebaikan moral ini, kita akan bergelut dengan kegiatan hati (*qolbu*), nilai (*value*), jiwa (*nafs*), sikap (*attitude*), mulai dari kegiatan memperhatikan fenomena sederhana sampai dengan kompleks dalam faktor internal seseorang yang menyentuh kepribadian dan hati nurani.¹² Kemanfaatan kajian mengenai sistem administrasi publik, pada hakikatnya terletak pada kesadaran adanya pengaruh besar dari karakteristik masyarakat di Indonesia. Dengan kata lain, kita sadar bahwa faktor-faktor kondisi setempat akan merupakan faktor penentu bagi administrasi publik, di dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dengan demikian, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang kongkrit terhadap konsep administrasi publik itu, sehingga menjadi sistem-sistem yang terstruktur.

¹¹ Dwiyanto Agus, Partini, Ratminto, Wicaksono Bambang, Tamtiari Wini, Kusumasari Bevaola, dan Nuh Muhamad (2002), *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: PSKK-UGM. Hlm. 188.

¹² Menurut Kratwohl, Bloom dan Masia (1964) hal ini disebut juga dengan pembelajaran afektif yang mulai sebagai berikut: (1) Pengenalan atau penerimaan seperti bersedia menerima dan memperhatikan berbagai stimulus (sehingga dengan demikian akan mendengarkan, menghadiri, melihat dan memperhatikan nilai-nilai kebaikan pada tingkat yang paling rendah). (2) Pemberian respon seperti keinginan untuk berbuat sesuatu sebagai reaksi terhadap suatu gagasan, benda atau sistem nilai (sehingga dengan demikian kita akan mengikuti, mendiskusikan, dan berpartisipasi menolong pada tingkatan selanjutnya). (3) Penghargaan terhadap nilai seperti konsisten berperilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain yang mengharuskan (sehingga dengan demikian kita akan memilih, meyakinkan, bertindak, dan mengemukakan argumentasi sebagai tingkat berikutnya). (4) Pengorganisasian seperti menunjukkan saling keterhubungan antar nilai tertentu dalam suatu sistem nilai, serta menentukan nilai-nilai mana yang mempunyai prioritas lebih tinggi dari pada nilai yang lain (sehingga dengan demikian kita akan memilih, memutuskan, dan memformulasikan sebagai tingkat yang lebih tinggi). (5) Pengamalan seperti menunjukkan perilaku yang konsisten dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang diyakini ke dalam filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan (sehingga dengan demikian kita akan menunjukkan sikap menolak dan menghindari sifat yang dianggap buruk, serta menerima sifat yang dianggap baik, sebagai tingkatan yang terakhir). Lihat Inu Kencana Syafiiie. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 211.

Berfikir secara sistem, berarti berarti berfikir secara menyeluruh terhadap hal-hal yang didekati tidak lagi bermula dari bagian-bagian, tetapi sebaliknya berasal dari keseluruhan. Kenyataan ini semakin menonjol di saat ketika kehidupan menjadi semakin kompleks dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat datangnya. Kebutuhan dan kepentingan manusia bergerak dengan satu ritme yang Dunia belum pernah menyaksikan sebelumnya. Teknologi memang menawarkan berbagai jalan keluar. Namun ternyata tidak seluruhnya berhasil secara memuaskan. Bersamaan dengan itu, setelah Perang Dunia II berakhir, spesialisasi dikembangkan terus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba teknologi. Santosa menyebutkan, elemen pokok dalam administrasi publik adalah bahwa setiap organ pemerintahan, tanpa memandang tingkatannya, harus melayani urusan publik. Rakyat, sebagai pembayar pajak, mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana uang Negara dipergunakan. Karena itu pula, mereka berhak mengkritik perilaku pejabat pemerintah serta merasa berhak berpendapat terhadap keputusan yang tidak disetujuinya.¹³ Satu diantara keterbatasan untuk menganalisa efisiensi administratif adalah ia mengambil kebijaksanaan atau tujuan dari organisasi sebagai bersifat tetap, dan memusatkan perhatian pada seberapa efektifkah ia dapat dilaksanakan. Tetapi ini sama dengan memperlakukan administrasi seolah-olah ia hanya merupakan sebuah masalah pelaksanaan kebijaksanaan ataupun tujuan-tujuan yang telah dicapai, dan mengabaikan kontribusinya terhadap perumusan awal. Sekalipun kita dapat menarik perbedaan jelas antara politisi dan para pejabat dalam artian metoda pengangkatan dan hakikat tanggung jawab mereka masing-masing, tetapi perbedaan itu tidak lantas bersifat koinsidental dengan garis yang ditarik antara perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan.

3 Makna Administrasi Publik Dari Berbagai Sudut Pandang

Pembaharuan administrasi publik ternyata bukan hanya melanda Indonesia, tetapi seluruh Dunia termasuk Negara-Negara maju sekalipun. Dari perkembangan administrasi publik dan reformasi yang dialaminya itu, makna atau rumusan administrasi publik pun berubah. Secara garis besar apa yang disebut reformasi administrasi publik dan maknanya. Disini penulis mempunyai perspektif mengenai pemaknaan keilmuan administrasi publik yang dikaji dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda.

Pertama dalam wilayah sosial. Prawironegoro menyebutkan, sejarah perkembangan masyarakat hakikatnya adalah sejarah dari perubahan dan perkembangan proses produksi, yaitu suatu perubahan terus-menerus tanpa henti manusia bekerja mencipta barang-barang material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴ Disini kiranya perlu kompromi atau diskursus-diskursus sosial antara Negara dan masyarakat dan/atau Pemerintah dengan

¹³ Orientasi pejabat pemerintah terhadap kepentingan publik adalah prinsip pokok dalam pemerintahan demokratis. Kesulitan yang dihadapi pemerintah adalah di satu pihak ia harus bekerja secara baik, tetapi di sisi lain pihak ia harus meyakinkan publik bahwa segala sesuatunya telah diselenggarakan secara baik. Dengan kata lain, ada keperluan kompetensi dan eksposisi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi cukup berat untuk mengkombinasikan kedua aspek ini pada diri seorang. Inilah yang seringkali tidak dipahami oleh publik, karena mereka tidak tahu bahwa dalam administrasi publik berlaku konsep-konsep legalitas, "red tape" (pita merah), normatif, kepentingan, konflik, dan pelayanan publik. Lihat Pandji Santosa. (2012). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 47-48.

¹⁴ Sejarah adalah hasil perkembangan dan perubahan ats kerja manusia dalam memproduksi barang material. Menurut Hegel, sejarah adalah hasil perkembangan Roh secara dialektik, sedangkan menurut Marx, sejarah adalah hasil perkembangan kerja masyarakat secara dialektik berbasis sistem ekonominya. Lihat Darsono Prawironegoro. (2011). *Filsafat Ilmu, Kajian Tentang Pengetahuan Yang Disusun Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Nusantara Consulting, hlm. 223.

rakyatnya. Sehingga manusia dalam membutuhkan kebutuhan hidupnya, terjaminnya dengan sistem ketertiban yang dibentuk oleh Negara atau Pemerintah/Birokrasi. Beetham menyetakan, birokrasi dapat dilihat sebagai pranata dunia kontemporer yang dirasionalisir secara sangat utuh.¹⁵ Publik/masyarakat merupakan objek ilmu administrasi publik sebagai media. Sehingga bisa dipilah beberapa upaya aparatur dalam pelayanan publik. Masyarakat hendaknya memahami kinerja pelayan publik pada saat ini, masyarakat harusnya mempelajari perkembangan-perkembangan ke-publik-an, sehingga antara yang melayani dan yang dilayani, tidak ada pemisah dalam kesosialan. Dengan administrasi publik semua diatur dalam tata laksananya. Administrasi publik berperan diantara hubungan-hubungan ke dalam masyarakat, dimana peranan tersebut bagaimana membentuk individu yang harus menjalankan peranannya, dalam bangunan-bangunan pemahaman proses penyelenggaraan aparatur dalam pelayanan publik itu sendiri. Maka penuntutan terakhir adalah membentuk masyarakat yang mandiri dalam penghidupan sosialnya.

Kedua dalam hal ekonomi, penulis menyatakan bahwa seharusnya sumber daya manusia yang semakin hari harus terbangun atas dasar yang mencerminkan kecerdasan yang membumi. Artinya sumber daya manusia harus mampu kritis dalam membaca peluang dan tantangan potensi bangsa dalam pencerminan nilai-nilai kebudayaannya, serta memiliki empati terhadap aspirasi apapun itu. Dalam filsafat dikaji bagaimana pembacaan peluang dan tantangan potensi itu dengan dua sisi objek (material dan formal), menurut Ahmadi objek material adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. "Ada" disini mempunyai tiga pengertian, yaitu ada dalam kenyataan, pikiran, dan kemungkinan.¹⁶ Objek material/inti permasalahan dalam hal ekonomi berupa kelangkaan, yaitu bagaimana manusia melakukan tindakan pemilihan atas berbagai keterbatasan dalam sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas baik dalam hal produksi ataupun konsumsi. Sedangkan menurut Tafsir objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Artinya, ingin tahunya filsafat ingin tahu bagian dalamnya. Kata mendalam artinya ingin tahu tentang objek yang tidak empiris.¹⁷ Objek formal dalam hal ekonomi ialah aspek kebutuhan material manusia dalam konteks sosialnya. Ekonomi berpusat pada penggunaan sumber dan benda ekonomi secara lebih efektif dan efisien berdasarkan kalkulasi yang bertanggung jawab, umpamanya pola konsumsi masyarakat. Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial dan memiliki objek formal, sama dengan objek formal ilmu-ilmu sosial lainnya. Adapun objek material ilmu ekonomi terkait dengan bagaimana manusia melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan.

Ketiga dalam hal politik, sumber daya manusia dalam organisasi merupakan prioritas tertinggi untuk mendapatkan perhatian di antara sumber daya lainnya karena kemampuannya yang sangat vital. Sebagaimana institusi politik lainnya, Negara adalah asosiasi hubungan manusia yang menguasai manusia lain, sedangkan politik adalah

¹⁵ Sebagai sistem administrasi maka birokrasi, menurut pandangan Weber adalah suatu formasi sosial yang sangat diperlukan dan yang telah berakar di dalam cirri-ciri dunia modern yang paling kentara. Pada saat yang sama, ia membentuk stuktur kekuasaan yang sangat hebat, dan karenanya menjadi sebuah sistem administrasi yang sangat efektif, kemampuannya mengkoordinasi kegiatan atau aksi-aksi disuatu wilayah yang sangat luas, kelanjutan kegiatan operasionalnya, monopolinya atas keahlian dan control dokumen, dan kohesi serta moral sosial internalnya. Lihat David Beetham. (1990). *Birokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 59.

¹⁶ Asmoro Ahmadi. (2013). *Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

¹⁷ Ahmad Tafsir. (2013). *Filsafat Umum Aksi dan Hati Sejak Tales Sampai Capra*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 21.

“upaya untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan baik antar Negara maupun antar kelompok yang ada dalam Negara”.¹⁸ Maka administrasi publik upayanya haruslah memberikan sebuah pelayanan yang prima kepada publik, itu dicapai ketika terjadinya kestabilan politik. Politik dan administrasi adalah dua sisi yang merangkai mekanisme dalam proses saling mendamaikan. Administrasi publik ada untuk menertibkan proses politik, sedangkan hasil proses politik sudah seharusnya mendewasakan aparatur birokrasi. Jadi, politik merupakan dimensi penting dalam administrasi publik. Menurut Prawironegoro hakikatnya ilmu politik adalah bangunan atas yang berdiri di atas sistem ekonomi dan sosial yang mengabdikan kepada kekuasaan untuk melindungi kepentingan ekonomi.¹⁹ Maka politik dan administrasi publik diibaratkan dua sisi yang tidak dipisahkan. Politik sebagai perumus strategi Negara dan administrasi publik sebagai pengimplementasi dari strategi tersebut. Politik tanpa administrasi publik hanya sekedar jargon dan janji-janji, sebaliknya administrasi publik tanpa politik hanya simbol-simbol semata. Teori politik merujuk pada seperangkat konsep mengenai fakta-fakta politik dan hubungan-hubungan diantara keduanya. Tujuannya adalah untuk membawa tatanan dan makna pada suatu pengumpulan data yang jika tidak demikian akan tetap tidak berkaitan dan tanpa tujuan.

Keempat dalam hal hukum, dalam perspektif ini, hukum harus memiliki sudut pandang yang menyikapi suatu masalah yang dilandaskan pada falsafah hukum Nasional yang berarti bahwa usaha pengembangan falsafah hukum Nasional di Indonesia bertumpu kepada 3 konsep dasar, yaitu: (1) Pemahaman hukum yang bersifat normatif, (2) Tujuan hukum, (2) Cita-cita falsafah hukum.²⁰ Hakikatnya filsafat hukum adalah pola pikir dan

¹⁸ Studi Weber mengenai otoritas politik sangat menarik perhatian pelajar yang mengkaji masalah pemerintahan. Tidak sebagaimana filosof sosial klasik, Weber hanya menaruh perhatian terhadap cara bagaimana kekuasaan berfungsi dalam masyarakat dan bukan dengan legitimasi moralnya. Pendekatan pada topic ini didasarkan pada metodologi “tipe ideal”. Ia membuka analisisnya dengan membagi otoritas yang sah menjadi tiga jenis pokok: Rasional, tradisional, dan karismatik. Tujuannya dalam memperkenalkan klasifikasi ini adalah untuk merumuskan skema konseptual sehingga kekuasaan politik bisa dikaji. Klasifikasi ini didasarkan pada klaim legitimasi yang dibuat oleh setiap jenis otoritas. Watak klaim ini menentukan jenis kepatuhan yang berlaku pada sistem otoritas tertentu, jenis staf administrasi yang dikembangkan untuk menjamin kelanjutannya, dan mekanisme dimana sistem itu dijalankan. Lihat Henry J. Schmandt. (2009). *Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Cetakan ketiga, terjemahan Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 629-630.

¹⁹ Darsono Prawironegoro. *Op.cit*, hlm. 388.

²⁰ Pemahaman hukum yang bersifat normatif sosiologis yang melihat huku tidak hanya sekumpulan kaidah dan asas yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu. Sejalan dengan konsep tersebut maka fungsi hukum dalam masyarakat adalah untuk terwujudnya ketertiban dan kepastian sebagai prasarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, serta sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Tujuan hukum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus juga merupakan perwujudan sila-sila Pancasila. Cita-cita falsafah yang telah dirumuskan oleh para pendiri Kenegaraan dalam Konsep Indonesia adalah Negara Hukum dan setiap orang sama di depan hukum, mengandung arti: (1) Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum menentukan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik yang berkesinambungan. (2) Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum menentukan bahwa hukum tidak membedakan antara orang berdasarkan status, sosial, kekuasaan, agama, atau keturunan. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan dan melakukan pembelaan di muka pengadilan. Lihat Soehardjo Sastrosoehardjo. (1997). *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 44.

perilaku efektif untuk membuat peraturan untuk melindungi kekuasaan.²¹ Oleh karena itu hukum secara normatif harus mempunyai makna peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, karenanya dalam pengaturannya pun akan jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma. Sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma dengan norma-norma lainnya. Dalam *Law enforcement* (Pelaksanaan Hukum) upaya pemberdayaan dan penguatan hukum harus pula didasarkan pada perilaku manusia itu sendiri, baik secara individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan/atau berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Saebani menyebutkan, cita-cita tertinggi dalam hukum adalah menegakan keadilan, tetapi yang menerapkan keadilan bukan teks-teks hukum melainkan manusia yang menerima sebuah hakim, pengacara, kuasa hukum, penegak hukum, penguasa hukum, polisi, dan sebagainya. Mereka semua membaca, menghapuskan pasal-pasal tentang hukum, menerapkan untuk tindak pidana/pidana tertentu, menafsirkannya dengan logika hukum dalam acara hukum didepan majelis hakim suatu persidangan di pengadilan.²² Penyelenggaraan dalam administrasi publik haruslah mengedepankan dasar hukum yang jelas sehingga menjadi sebuah keputusan yang mutlak. Konsekuensinya, keputusan yang mutlak tersebut tidak bisa dilakukan semena-mena.

Kelima dalam hal psikologi dan sisi kejiwaan, sumber daya manusia sebagai postur pemimpin harus mencerminkan perilaku yang baik dan terpuji. Untuk itu, seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan yang komprehensif/menyeluruh yang artinya bahwa pemimpin holistik (*holistic leader*). Menurut Amin konsep "*Holistic Leadership*" ini diterapkan oleh H. Haryoko dengan model *all in one* yaitu menyatukan antara tugas-tugas organisasi dengan nilai-nilai sosial, etika/budi pekerti dan agama menjadi satu kesatuan paket kegiatan. Sehingga proses yang berjalan dalam pelaksanaan tugas memiliki nilai yang lebih bermakna dan tidak hanya berorientasi pada kehidupan di dunia saja, namun juga berharap bisa memiliki nilai untuk kehidupan akhirat kelak.²³ Maka kepemimpinan yang bersifat holistik di dalam dirinya secara terpadu telah memenuhi berbagai kriteria (kualifikasi) pemimpin masa depan. Bachtiar menyatakan bahwa Filsafat kejiwaan kejiwaan juga dibagi ke dalam tiga bagian yaitu: pemikiran subjektif, tuntutan hidup individu sebagai subjek dan pemikiran objektif. Selanjutnya tuntutan hidup digantikan *logos* dalam bentuk-bentuk sosial dan institusi sejarah, perlindungan masalah-masalah hukum, moral, etika hidup keluarga dan Negara.²⁴ Saebani menyatakan, segala

²¹ Ilmu hukum yaitu suatu ilmu tentang bagaimana cara membuat peraturan, melaksanakannya, dan mengubahnya sesuai dengan kepentingan penguasa Negara berdasarkan keadaan sosial. Lihat Darsono Prawironegoro. *Op.cit*, hlm. 413.

²² Beni Ahmad Saebani. (2008). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, hlm, 17.

²³ Muhamad Amin. (2017). *Holistic Leadership (Studi Kepemimpinan ala H. Haryoko di RSU Sejahtera Bhakti Salatiga)*. Tesis.

²⁴ Dalam filsafat kebenaran Hegel, dia mengusulkan untuk mendemonstrasikan prose situ dengan ide-ide Negara yang terbentuk Poin awal dalam menganalisisnya adalah kekuasaan, yang dipahami sebagai intelegensi murni, keabadian, universal, kesadaran diri dan ketetapan diri sebagai geist, kemerdekaan adalah esensi dari keleluasaan, kemerdekaan adalah ide kebebasan bahwa kekuasaan adalah kebebasan. Ide absolut hanya direalisasikan oleh Negara. Hukum sebagai bentuk dari kekuasaan yang mampu merealisasikan personalitas, properti dan kontrak. Kehidupan penciptaan adalah hal yang personal sepanjang kekuasaan dari individu yang menjadi sifat. Kemanusiaan menjadi sebuah sifat hanya ketika dia tidak berkuasa. Kebebasan juga direalisasikan dalam moralitas subjektif yang termasuk aspek-aspek kesadaran itu yang mana individu dipengaruhi oleh kesadaran yang lain. Tujuan tanggung jawab dan motivasi adalah perwujudan dari kekuasaan tingkat ini. Hubungan antara kedewasaan individu dengan kedewasaan universal terjadi dalam kebiasaan, moralitas atau etika sosial. Adat dan kebiasaan manusia merupakan kerja dari sebuah sebab universal pada waktu yang sama bahwa mereka merupakan pilihan

sesuatu memiliki hakikat dan hakikat segala sesuatu adalah sesuatu itu sendiri.²⁵ Masih menurut Saebani bahwa, segala sesuatu adalah tidak ada yang tidak ada, sebab ketiadaan adalah keadaan tentang sesuatu yang ada yang berbeda dengan keberadaan yang terbayangkan oleh hukum lahiriyah alami.²⁶ Dengan demikian, dalam diri anak buah tumbuh rasa segan dan *respect* yang berefek positif terhadap terbangunnya motivasi yang bukan atas dasar rasa takut (*fear motivation*) tapi motivasi yang terbangun karena komitmen pribadi.

4 Kesimpulan

Prinsipnya filsafat mengajarkan bagaimana pembentukan keilmuan secara sistematis dan sistemik dalam bangunan keilmuan administrasi, sehingga filsafat bisa dijadikan metode pembentukan ilmu administrasi. Jika dikaitkan dengan keilmuan administrasi publik, filsafat berperan dalam dua sisi sebagai hakikat dan makna. Hakikatnya terkait apapun itu dalam pengembangan keilmuan administrasi publik adalah untuk kepentingan bersama. Maknanya disini bagaimana semua bisa dikonstruksi keilmuan itu untuk mampu bersaing, untuk mampu menciptakan sebuah tatanan baru yang nanti kebudayaan proses penyelenggaraan yang bersifat publik bisa dilakukan secara kolektif dan kedepan akan berjalan dengan semestinya.

Daftar Pustaka

- Achmad, Tjetjep. (1989). *Filsafat Administasi dan Manajemen*. Bandung: YBA-IKLUM STIA-LAN RI Jawa Barat.
- Agus, Dwiyanto., Partini, Ratminto, Bambang, Wicaksono., Wini, Tamtiari., Bevaola, Kusumasari, dan Muhamad, Nuh. (2002), *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Yogyakarta: PSKK-UGM.
- Ahmadi, Asmoro. (2013). *Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, Muhamad. (2017). *Holistic Leadership (Studi Kepemimpinan ala H. Haryoko di RSU Sejahtera Bhakti Salatiga)*. Tesis.
- Bachtiar, Wardi. (2006). *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Beetham, David. (1990). *Birokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim, Atong Abdul dan Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Filsafat Umum Dari Metologi Sampai Teofilosofi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, Amin. (2008). *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Prawironegoro, Darsono. (2011). *Filsafat Ilmu, Kajian Tentang Pengetahuan Yang Disusun Sistematis dan Sistemik Dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Sadulloh, Uyoh. (2012). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

individu. Lihat Wardi Bachtiar. (2006). *Sosiologi Klasik Dari Comte Hingga Parsons*. Bandung: Remaja Rosadakarya, hlm. 121-122.

²⁵ Beni Ahmad Saebani. *Op.cit*, hlm, 17.

²⁶ Segala sesuatu memberikan kemungkinan untuk dianalisis melalui pengolahan alat piker manusia, sehingga *impossible is impossible*, karena alat piker manusia, tidak terbatas. Akal yang terdapat dalam batok kepala dan urat saraf manusia dapat disambungkan dengan kalbu dan hati nurani yang berbuah rasa. Oleh karena itu, sesukar apapun masalah yang dihadapi, manusia akan memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Lihat Beni Ahmad Saebani. *Ibid*, hlm, 17-18.

- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Filsafat Ilmu, Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk-Beluk Sumber dan Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Santosa, Pandji. (2012). *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Sardar, Ziauddin. (2000). *Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastrosoehardjo, Soehardjo. (1997). *Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum*. Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Schmandt, Henry J. (2009). *Filsafat Politik, Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Cetakan ketiga, terjemahan Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarminta, J. (2002). *Epistemologi Dasar, Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kansius.
- Suryadi, Soleh. (2012). *Administrasi Publik dan Otonomi Daerah*. Bandung: Prisma Press.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tafsir, Ahmad. (2013). *Filsafat Umum Aksi dan Hati Sejak Tales Sampai Capra*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thoha, Miftah. (2011). *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.